

Pengeluaran Pemerintah Sektor Perlindungan Sosial, Ketertiban Keamanan, dan Kriminalitas

Syofia Sofatunisa Ramdayani¹, Bayu Kharisma^{2*}, Kodrat Wibowo³

^{1,2,3}Departement Ilmu Ekonomi Universitas Padjadjaran, Indonesia

¹ssyoooffitaa@gmail.com, ²bayu.kharisma@unpad.ac.id, ³kodrat.wibowo@fe.unpad.ac.id, *corresponding author

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melihat menganalisis pengeluaran pemerintah di sektor perlindungan sosial dan ketertiban keamanan terhadap kriminalitas dengan menggunakan data kepolisian dari 26 polres di Jawa Barat selama tahun 2012-2016. Metode penelitian yang digunakan adalah *fixed effect Pooled EGLS (Cross Section Weights)*. Selain itu, untuk menguji konsistensi dari variabel utama yang diteliti, penelitian ini juga dilengkapi *robust First Difference-Generalized Method Moment (FD-GMM)* dan *System-Generalized Method Moment (SYS-GMM)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi pengeluaran pemerintah di sektor ketertiban keamanan dan perlindungan sosial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah total kriminalitas. Hasil tersebut membuktikan bahwa kebijakan anggaran pemerintah mampu memberikan kontribusi positif terhadap penurunan angka kriminalitas.

Kata Kunci: *fixed effect*, kriminalitas, pengeluaran pemerintah, perlindungan sosial, ketertiban keamanan

Local Government Spending on Social Protection, Security Order, and Crime

Abstract: This study aims to analyze the effect of government spending on social protection and security order sectors on crime using police data from 26 police stations in West Java during 2012-2016. The research method used is the fixed effect Pooled EGLS (Cross Section Weights). Also, to test the consistency of the main variables studied, this study features robust First Difference-Generalized Method Moment (FD-GMM) and System-Generalized Method Moment (SYS-GMM). The results showed that the combination of government spending in the security order and social protection sectors had a negative and significant effect on the total amount of crime. These results prove that the government's budget policy can create a positive contribution to reducing crime rates.

Keywords: fixed effect, crime, government spending, social protection, security order

PENDAHULUAN

Kriminalitas merupakan indikator negatif dari rasa aman. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat di suatu daerah semakin tidak aman (Statistik kriminal, 2016). Dalam menanggulangi masalah kriminalitas, pemerintah telah berkomitmen untuk memberikan rasa aman seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28G ayat 1 dan Undang-undang No 17 tahun 2007 yang menyatakan bahwa mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu yaitu salah satunya dengan mencegah terjadinya tindak kejahatan dan menurunkan tingkat kriminalitas di Indonesia (RPJP, 2007).

Becker (1974) merupakan salah satu tokoh yang mengemukakan literatur mengenai kriminalitas melalui pendekatan ekonomi. Becker (1974) mengasumsikan bahwa seseorang melakukan kejahatan jika *expected utility* melebihi *utility* yang diterima jika menggunakan

waktu dan sumber dayanya untuk melakukan kegiatan lainnya. Beberapa orang menjadi kriminal bukan karena motivasi dasar, melainkan karena perhitungan manfaat dan biaya. Becsi (1999) menunjukkan bahwa model ekonomi kriminal mengasumsikan tiga aktor yang dianggap berusaha untuk membuat keputusan rasional yaitu pelaku kriminal, rumah tangga non-kriminal, dan pemerintah. Kriminalitas memiliki tingkat keseimbangan yang terbentuk dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Sisi permintaan terdiri dari komponen permintaan langsung terhadap harta rampasan kejahatan seperti layaknya pasar barang normal yang terjadi pada *shadow economy* dan permintaan tidak langsung terhadap perlindungan dan asuransi serta berhubungan negatif terhadap harta rampasan kejahatan. Hubungan negatif ini dikarenakan semakin tingginya tindak kejahatan maka individu akan meningkatkan keamanan harta bendanya sehingga biaya dari tindak kejahatan akan meningkat dan benefit dari tindak kejahatan akan menurun. Sementara itu, dari sisi penawaran, kejahatan ditentukan oleh pelaku kejahatan yang melakukan tindak kejahatan pada tingkat *loot* tertentu. Penawaran kejahatan berslope positif karena semakin besar *loot* maka akan semakin besar pula angka kejahatan yang berpotensi untuk dilakukan. Sedangkan permintaan kejahatan merupakan pembiaran jumlah kejahatan pada tingkat *loot* tertentu akibat biaya proteksi yang lebih tinggi dibandingkan nilai *loot* tersebut. Tingginya penawaran kejahatan akan memunculkan permintaan masyarakat akan perlindungan keamanan dari tindak kriminalitas di wilayahnya. Dalam hal ini pemerintah berperan mempengaruhi keduanya, yaitu sebagai pemberi jasa keamanan dan pemberi hukuman bagi para pelaku. Pemerintah sebagai pemberi layanan publik untuk keamanan akan membuat kebijakan untuk menurunkan permintaan dan penawaran kejahatan. Hal ini kemudian akan mengakibatkan kenaikan biaya untuk melakukan tindak kejahatan yang pada akhirnya dapat menyebabkan turunnya imbalan melakukan tindak kejahatan.

Teori kontrol sosial atau *social bond theory* dipopulerkan oleh Hirschi pada tahun 1969 (dalam Gillbert & Sookram, 2009). Teori tersebut mengasumsikan bahwa kriminalitas merupakan suatu bagian perilaku manusia yang normal dilakukan karena seseorang lebih mudah untuk mendapatkan keinginan secara illegal daripada melalui cara legal. Kriminalitas atau penyimpangan diakibatkan karena tidak adanya keterikatan atau kurangnya keterikatan (moral) pelaku terhadap masyarakat. Ada empat elemen keterikatan yang saling berkaitan yaitu: *attachment, commitment, involvement, dan belief*. Teori kontrol sosial percaya bahwa untuk mencegah tindakan kriminal, masyarakat harus dikontrol atau dikendalikan karena masyarakat merupakan subjek dari kriminalitas itu sendiri. Cara yang paling efektif untuk menghadapi tindak kriminal adalah dengan mengendalikannya dibandingkan mencari penyebabnya. Ada tiga jenis pengendali atau kontrol yang dirujuk oleh teori ini di antaranya *direct control, stake in conformity and internal* (Gillbert & Sookram, 2009). O'Sullivan (2009) menyatakan bahwa kriminalitas dapat menimbulkan kerugian akibat biaya yang ditimbulkan dari tindak kejahatan. Biaya tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan korban meliputi hilangnya nilai properti, biaya pengobatan, *opportunity cost* dari hilangnya waktu kerja, rasa sakit dan penderitaan, serta berkurangnya nilai kehidupan. Dengan demikian, menekan angka kriminalitas hingga tingkat terendah merupakan hal

yang penting untuk digalakkan oleh pemerintah dalam rangka mendukung peran aktif masyarakat terhadap optimalisasi proses pembangunan.

Berdasarkan *World Justice Project* (2016), Indonesia merupakan negara yang menempati posisi keempat terendah di regional Asia Tenggara mengungguli Thailand, Filipina, Kamboja dengan skor sebesar 0,78 dan termasuk ke dalam kategori tingkat ketertiban dan keamanan rendah. Perolehan skor tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana, konflik perdata, dan tindakan kekerasan di Indonesia masih belum efektif dibatasi dan diatasi dengan baik. Ahli kriminolog Lacassagne dan Karl Marx (dalam Atmasasmita dan Wibowo, 2016) berpendapat bahwa memburuknya situasi ekonomi dan kekuasaan kaum kapitalis merupakan penyebab kesengsaraan dalam masyarakat sehingga mendorong masyarakat melakukan kejahatan dan lingkungan sosial ekonomi masyarakat yang memburuk merupakan tempat persemaian tumbuh dan berkembangnya kejahatan.

Bila melihat secara spesifik pada tingkat provinsi di Indonesia, tindak kriminalitas banyak terjadi di provinsi-provinsi yang padat akan penduduknya. Berdasarkan data yang diperoleh dari markas besar kepolisian republik Indonesia (Mabes Polri) pada tahun 2010 hingga tahun 2016, provinsi Jawa Barat menempati urutan kedua dengan jumlah kriminalitas terbesar di Indonesia setelah Provinsi Sumatera Utara. Bahkan tingkat penyelesaian kasus di Jawa Barat hanya mencapai 49,51% atau dibawah rata-rata pencapaian tingkat penyelesaian kasus di Indonesia yang mampu mencapai 57,6%. Kondisi ini membuktikan bahwa upaya pemerintah dalam menindaklanjuti angka kriminalitas masih belum efektif sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi ketertiban dan keamanan di Jawa Barat belum sepenuhnya kondusif. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Mabes Polri, angka kriminalitas di Jawa Barat terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Menurut Becker (dalam Atmasasmita dan Wibowo, 2016) agar individu tidak melakukan tindak kejahatan, utilitas dari tindak kejahatan harus dikurangi di bawah tingkat kesejahteraan dan pencegahan marginal akan menjadi cara penegakkan hukum tambahan yang dibutuhkan untuk membawa utilitas berbuat kejahatan turun ke tingkat paling rendah. Berkaitan dengan hal tersebut, pengeluaran pemerintah di sektor ketertiban keamanan dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencegah tindak kriminal karena implementasi dari anggaran ketertiban keamanan akan meningkatkan probabilitas penangkapan dan hukuman (McPheter, 1974). Selain itu, utilitas marginal dari keuntungan marginal tindak kriminal juga dapat dikurangi dengan memberikan bantuan sosial (Meloni, 2014). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh McPheter (1974) dan Meloni (2014) tersebut menunjukkan indikasi bahwa kebijakan anggaran di bidang keamanan dan sosial dipercaya memiliki dampak terhadap penurunan angka kriminalitas. Selain itu, beberapa penelitian yang dilakukan Becsi (1999) dan Arshad (2016) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah terbukti signifikan untuk mencegah dan menanggulangi kriminalitas. Selanjutnya, Ivaschenko et al (2012) dan Meloni (2014) juga menunjukkan hal serupa bahwa pengeluaran pemerintah di sektor sosial mampu menjadi solusi untuk menyeimbangkan dampak negatif dari krisis ekonomi yang menyebabkan terjadinya kriminalitas. Meskipun terdapat beberapa perbedaan, temuan dari penelitian terdahulu memberikan kesimpulan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan salah satu kebijakan

publik yang memiliki peran penting dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat sehingga pada akhirnya akan berpengaruh dalam menentukan tingkat kriminalitas.

Pengeluaran pemerintah dalam penelitian ini menggabungkan antara pengeluaran pemerintah di sektor perlindungan sosial dan ketertiban keamanan. Kombinasi inilah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lain pada umumnya. Pengeluaran pemerintah sektor perlindungan sosial dan ketertiban keamanan merupakan kebijakan rasional yang diciptakan dalam rangka mewujudkan suatu perlindungan komprehensif yang tidak hanya memberikan perlindungan dari sisi keamanan juga perlindungan sosial bagi kesejahteraan masyarakat sehingga akan tercipta kehidupan kondusif dan sejahtera.

Penelitian ini memberikan kontribusi berupa pemahaman dan gambaran yang lebih baik dari aktivitas kriminal pada area tertentu sesuai dengan karakteristik daerahnya khususnya di Provinsi Jawa Barat. Adapun penambahan variabel pengeluaran pemerintah sektor perlindungan sosial dan ketertiban keamanan akan memberikan gambaran mengenai dampak dari dicanangkannya kebijakan pemerintah dalam mengatasi gangguan sosial khususnya kriminalitas. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk : (1) menganalisa seberapa besar peran pengeluaran pemerintah (kombinasi sektor perlindungan sosial dan ketertiban keamanan) terhadap kriminalitas di Jawa Barat, (2) menganalisa pengaruh pengeluaran per kapita, ketimpangan, kepadatan penduduk, dan pendidikan sebagai variabel kontrol terhadap kriminalitas di Jawa Barat, (3) menganalisa kebijakan apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah kriminalitas.

METODE

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk data panel yang terdiri dari 26 polres di Jawa Barat sebagai *cross section* dan periode tahun 2010-2016 sebagai *time series*-nya. Berdasarkan data yang diperoleh dari kepolisian, Jawa Barat merupakan salah satu provinsi paling rawan kriminalitas. Pada tahun 2012-2016 terjadi fenomena penurunan angka kriminalitas di Jawa Barat. Fenomena tersebut menarik diamati, mengingat pada periode sebelum tahun 2012, angka kriminalitas di Jawa Barat terus mengalami peningkatan. Tren positif di Jawa Barat juga berbanding terbalik dengan tren kriminalitas di Indonesia yang cenderung meningkat. Meskipun terjadi penurunan, angka kriminalitas di Jawa Barat masih dikategorikan tinggi apabila dibandingkan dengan Provinsi lain. Dengan demikian, diduga penurunan angka kriminalitas di Jawa Barat merupakan efek positif dari upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kondisi keamanan dan program kesejahteraan di bidang sosial.

Data yang digunakan diperoleh dari kepolisian daerah Jawa Barat (POLDA Jabar). Metode penelitian ini menggunakan model *fixed effect Pooled EGLS (Cross Section Weights)* dengan *cross section specific coefficient* untuk mengetahui secara spesifik koefisien variabel di tiap wilayah yang diteliti. Selain itu, untuk menguji konsistensi dari variabel utama yang diteliti, penelitian ini juga dilengkapi *robust First Difference-Generalized Method Moment (FD-GMM)* dan *System-Generalized Method Moment (SYS-GMM)*. Spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dari model yang digunakan Buonanno (2008)

dan Meloni (2014). Perbedaan utama penelitian ini dengan kedua penelitian terdahulu adalah adanya variabel kombinasi pengeluaran pemerintah sektor perlindungan sosial dan ketertiban keamanan.

Tabel 1. Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Konsep Variabel	Satuan	Sumber
1	Kriminalitas (CRIME)	Jumlah total kejahatan konvensional yang tercatat (<i>crime reported</i>) di Polres setiap tahunnya per 100.000 penduduk	Kasus (per 100.000 penduduk)	Polda Jabar, Polda Metro Jaya
2	Pengeluaran pemerintah (perlindungan Sosial dan ketertiban keamanan) per kapita (LnGOV)	Realisasi pengeluaran pemerintah per tahun menurut fungsi yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan keamanan.	Rupiah	DJPK Kemenkeu
4	Ketimpangan (THEIL)	Ukuran pemerataan intra wilayah yang diukur melalui pendapatan per kapita	Satuan	Bappeda Jabar
5	Pengeluaran per kapita (LnEXPC)	Kemampuan masyarakat untuk membelanjakan uangnya dalam bentuk barang dan jasa per tahun (Riil)	Rupiah	BPS Jabar
6	Laju kepadatan penduduk (DEN)	Laju perbandingan antara jumlah penduduk dibagi luas wilayahnya.	Persen	BPS Jabar
7	Partisipasi Pendidikan (EDUPAR)	Presentase penduduk 10 tahun keatas yang lulus pendidikan SMA dan universitas	Persen	BPS

Model yang dibangun dalam penelitian ini dimodifikasi dari model penelitian Meloni (2014) dengan persamaan sebagai berikut:

$$CRIME_{it} = \beta_0 + \beta_1 CRIME_{i,t-1} + \beta_2 RELIEF_{it} + \beta_3 CONTROLS_{Jit} + \epsilon_{it} \dots \dots \dots (1)$$

Di mana CRIME merupakan kriminalitas, *explanatory variables* yaitu bantuan sosial dan *control variables* meliputi pajak penghasilan, pertumbuhan pajak penghasilan, transfers, pengeluaran per kapita, kepadatan penduduk, penganguuran, gini, dan kemiskinan. Modifikasi dari penelitian Meloni (2014) pada persamaan (1) dilakukan dengan menghilangkan *lagged* variabel dependen dan menambahkan variabel baru yang ingin diteliti ke dalam model. Selain itu, pemilihan variabel operasional disesuaikan dengan ketersediaan data Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Adanya perbedaan satuan variabel menjadikan data variabel independen maupun variabel dependen ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural (Ln) sehingga data regresi berdistribusi normal. Adapun model persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$\text{LnCRIME}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{LnGOV}_{it} + \beta_2 \text{LnEXPC}_{it} + \beta_3 \text{THEIL}_{it} + \beta_4 \text{DEN}_{it} + \beta_5 \text{EDU}_{it} + \varepsilon_{it} \dots (2)$$

Di mana CRIME adalah jumlah total kriminalitas yang dilaporkan, LnGOV yaitu pengeluaran pemerintah (perlindungan sosial dan ketertiban keamanan), THEIL adalah indeks theil yang mencerminkan ketimpangan wilayah, LnEXPC merupakan pengeluaran per kapita, DEN yaitu laju kepadatan penduduk, EDU adalah tingkat partisipasi pendidikan (SMA-Universitas), *i* yaitu Kabupaten/Kota, *t* merupakan tahun dan ε_{it} yaitu *error term*. Operasional variabel diperlukan dengan maksud agar tidak terjadi pemaknaan ganda terhadap variabel penelitian sehingga pengukuran dapat dilakukan dengan tepat. Operasional variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPk–Kemenkeu), Mabes POLRI, POLDA Jabar, POLDA Metro Jaya, BPS Pusat, jurnal, dan buku yang terkait dengan variabel penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan *time series* tahun 2012-2016 dan 26 Kabupaten/Kota sebagai *cross section*-nya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

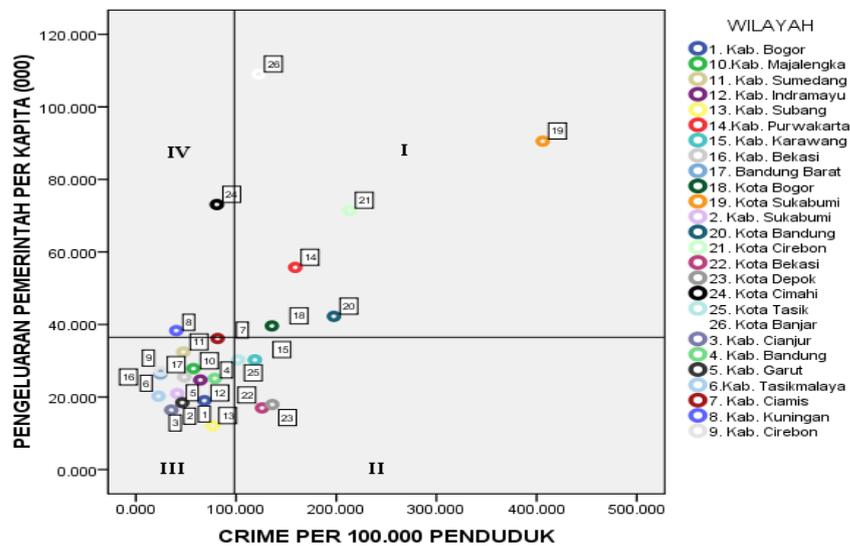
Sebelumnya akan dibahas terlebih dahulu tentang *descriptive statistics* mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian dengan tahun data 2012-2016. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *total crime* per 100.000 penduduk, realisasi pengeluaran pemerintah per kapita (kombinasi pengeluaran pemerintah sektor perlindungan sosial dan ketertiban keamanan), pengeluaran per kapita, ketimpangan wilayah atau indeks Theil, kepadatan penduduk, serta pendidikan yang diukur melalui presentase penduduk tingkat pendidikan SMA-Universitas. Secara deskriptif, variabel-variabel penelitian dapat dilihat pada statistik deskriptif di Tabel 2.

Tabel 2 Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Median	Maximum	Minimum	Std, Dev,
LnCRIME	4,314943	4,315060	6,527075	2,981019	0,728561
LnGOV	3,432604	3,311629	5,471763	1,869379	0,627846
LnEXPC	2,237443	2,226124	2,760326	1,829878	0,215283
THEIL	1,481361	0,870851	4,249919	0,400301	1,179078
DENGR	2,027857	1,227662	21,482190	-15,5202	5,094288
EDUPAR	33,971690	31,225000	72,630000	11,09000	15,722750

Data *total crime* per 100.000 penduduk pada tahun 2012-2016 memiliki rata-rata dalam bentuk logaritma natural sebesar 4,315 atau sebanyak 98,204 kasus per 100.000 penduduk. Wilayah dengan *total crime* per 100.000 penduduk tertinggi adalah Kota Sukabumi pada tahun 2015 dengan angka logaritma natural sebesar 6,527 atau sebanyak 683,396 kasus per 100.000 penduduk sedangkan yang terendah adalah polres Tasikmalaya pada tahun 2013 dengan angka logaritma natural sebesar 2,981 atau sebanyak 19,708 kasus per 100.000 penduduk. Realisasi pengeluaran pemerintah (kombinasi perlindungan sosial

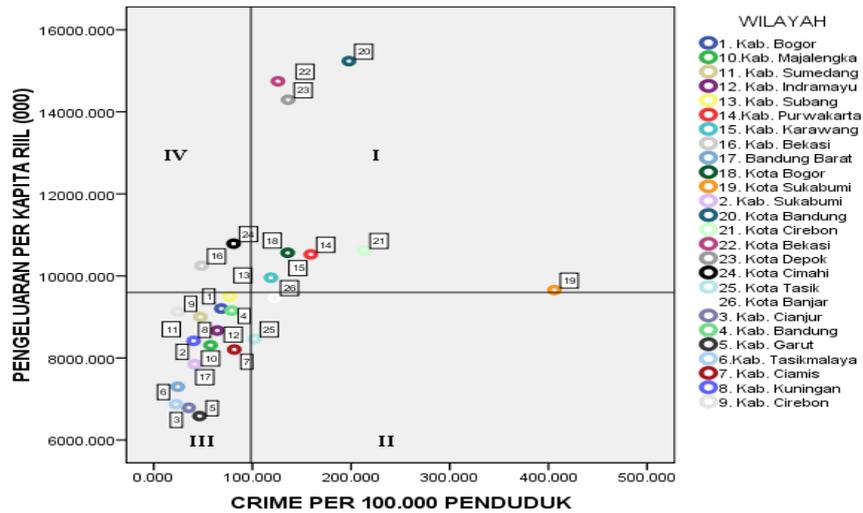
dan ketertiban keamanan) perkapita tahun 2012-2016 mencapai angka rata-rata logaritma natural sebesar 3,433 atau sebesar Rp. 38.466.38/jiwa. Wilayah dengan pengeluaran pemerintah tertinggi yaitu Kota Sukabumi pada tahun 2013 dengan nilai logaritma natural yaitu 5,472 atau sebesar Rp. 237.879,26/jiwa. Sementara yang terendah adalah Kabupaten Subang pada tahun 2016 dengan angka logaritma natural sebesar 1,869 atau sebesar Rp 6484,27/jiwa.



Gambar 1. Pola Persebaran Rata-rata Antara Kriminalitas dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Perlindungan Sosial dan Ketertiban Keamanan Tahun 2012-2016

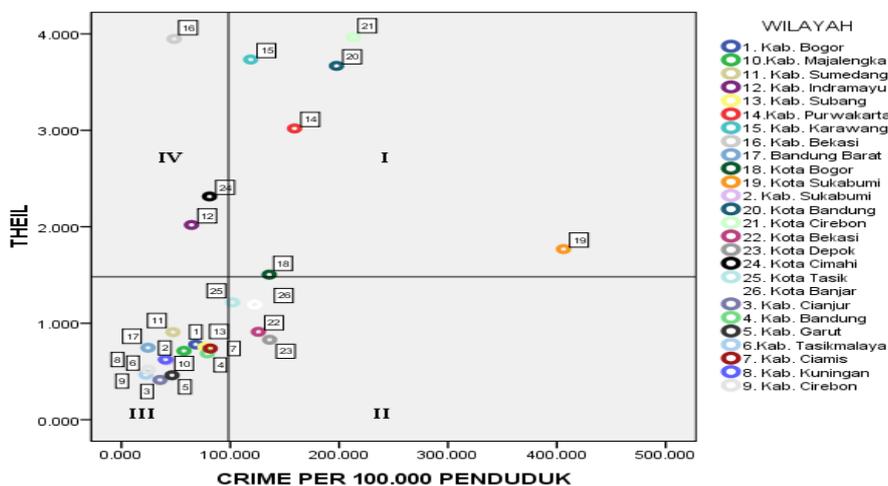
Perbedaan potensi ekonomi, dan perbedaan keuangan daerah di setiap daerah menyebabkan adanya perbedaan kemampuan alokasi anggaran antara wilayah satu dengan yang lain. Adapun Gambar 1 menunjukkan pola rata-rata persebaran kriminalitas dan pengeluaran pemerintah sektor perlindungan sosial dan ketertiban keamanan sebagian besar tersebar di kuadran III di mana kriminalitas di bawah rata-rata dan anggaran pun di bawah rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Pengeluaran per kapita tahun 2012-2016 mencapai angka rata-rata logaritma natural sebesar 2,237 atau sebesar Rp. 9.597 juta/tahun. Wilayah dengan pengeluaran per kapita tertinggi yaitu Kota Bandung pada tahun 2016 dengan nilai logaritma natural yaitu 2,760 atau sebesar Rp 15.805 juta/tahun. Sementara yang terendah adalah Kabupaten Cianjur pada tahun 2012 dengan angka logaritma natural sebesar 1,830 atau sebesar Rp 6.553 juta/tahun. Pengeluaran per kapita di perkotaan lebih besar dibandingkan di pedesaan karena masyarakat di perkotaan lebih banyak mengkonsumsi bukan makanan daripada makanan sedangkan di pedesaan terjadi sebaliknya. Kondisi ini menandakan bahwa tingkat kesejahteraan di perkotaan lebih tinggi daripada di pedesaan (BPS, 2013). Adapun Gambar 2 menunjukkan pola rata-rata persebaran kriminalitas dan pengeluaran perkapita riil sebagian besar tersebar di kuadran III dimana kriminalitas di bawah rata-rata dan pengeluaran per kapita pun di bawah rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

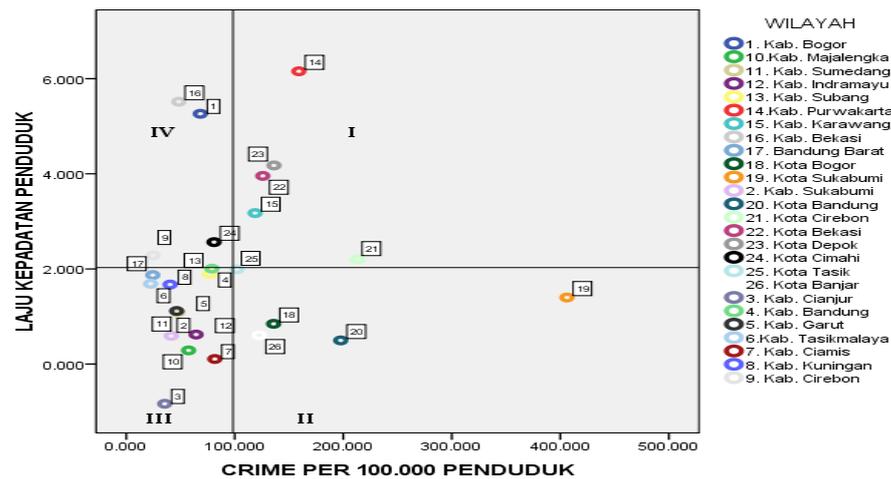


Gambar 2. Pola Persebaran Rata-rata Antara Kriminalitas dan Pengeluaran per kapita Tahun 2012-2016

Ketimpangan wilayah tahun 2012-2016 mencapai angka rata-rata sebesar 1,48 satuan. Wilayah dengan ketimpangan tertinggi yaitu Kabupaten Bekasi pada tahun 2013 sebesar 4,250 satuan. Sementara yang terendah adalah Kabupaten Cianjur pada tahun 2012 sebesar 0,400. Tingkat ketimpangan intra wilayah tergantung pada besaran PDRB per kapita di suatu wilayah. Apabila peningkatan PDRB per kapita di suatu wilayah hanya dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat maka kondisi tersebut akan memicu kenaikan tingkat ketimpangan. Kabupaten Bekasi misalnya, wilayah tersebut memiliki PDRB per kapita tertinggi di Jawa Barat. Namun ternyata potensi sektor industri dan perdagangan yang menjadi faktor pemicu meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bekasi hanya terkonsentrasi di beberapa daerah sehingga kondisi tersebut meningkatkan ketimpangan. Adapun Gambar 3 menunjukkan pola rata-rata persebaran kriminalitas dan indeks Theil sebagian besar tersebar di kuadran III dimana kriminalitas di bawah rata-rata dan indeks Theil pun di bawah rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

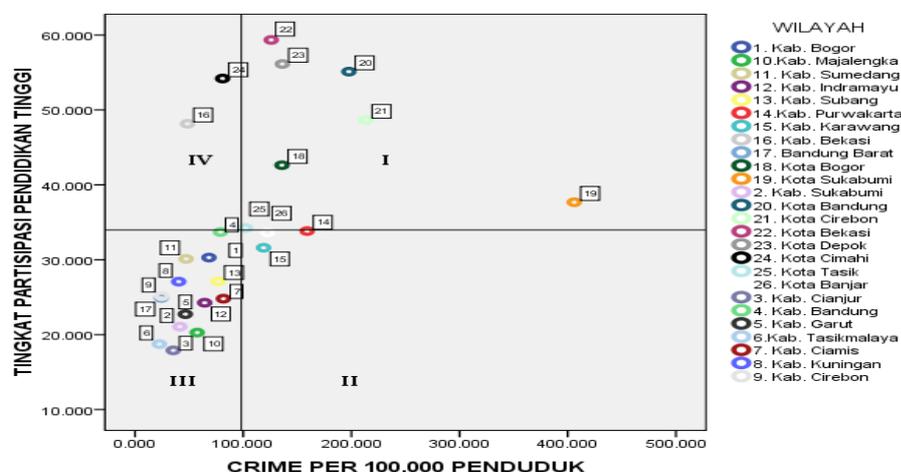


Gambar 3. Pola Persebaran Rata-rata Antara Kriminalitas dan Indeks Theil Tahun 2012-2016



Gambar 4. Pola Persebaran Rata-rata Antara Kriminalitas dan Laju Kepadatan Penduduk Tahun 2012-2016

Laju kepadatan penduduk tahun 2012-2016 mencapai angka rata-rata sebesar 2,023%. Wilayah dengan laju kepadatan penduduk terbesar yaitu Kabupaten Purwakarta pada tahun 2014 dengan laju sebesar 21,482%. Sementara yang terendah juga masih ditempati oleh Kabupaten Purwakarta pada tahun 2015 dengan penurunan sebesar 15,502%. Tingginya laju kepadatan penduduk di Kabupaten Purwakarta dikarenakan wilayah ini memiliki potensi di sektor industri misalnya pabrik-pabrik sehingga tingkat migrasi penduduknya juga besar dan berfluktuasi (Bappedda Purwakarta, 2018). Adapun Gambar 4 menunjukkan pola persebaran kriminalitas dan laju kepadatan penduduk sebagian besar tersebar di kuadran III di mana kriminalitas di bawah rata-rata dan laju kepadatan penduduk pun di bawah rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.



Gambar 5. Pola Persebaran Rata-rata Antara Kriminalitas dan Tingkat Partisipasi Pendidikan Tahun 2012-2016

Tingkat partisipasi penduduk sekolah menengah atas (SMA) hingga Universitas tahun 2012-2016 mencapai angka rata-rata sebesar 33,972%. Wilayah dengan tingkat partisipasi pendidikan terbesar yaitu Kota Bogor pada tahun 2012 sebesar 72,630%. Sementara yang terendah adalah Kabupaten Cianjur pada tahun 2013 yaitu sebesar 11,090%. Adapun Gambar 5 menunjukkan pola persebaran kriminalitas dan pendidikan sebagian besar tersebar di kuadran III dimana kriminalitas di bawah rata-rata dan laju kepadatan penduduk pun di bawah rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.

Analisis data pada penelitian ini menggunakan model *fixed effect pooled EGLS (Cross Section Weights)* dengan *cross section specific coefficient* untuk mengetahui secara spesifik koefisien variabel di tiap wilayah yang diteliti. Metode *fixed effect* digunakan sebagai metode terbaik berdasarkan hasil uji *Hausman*. Selain itu, untuk memperkuat hasil penelitian bahwa variabel yang digunakan dalam model bersifat valid maka dilakukan *robustness check* metode *Generalized Method Moments (GMM)*. Data panel yang diolah terdiri dari data *time series* tahun 2012-2016 dan data *cross section* 26 kabupaten/kota di Jawa Barat. Model dalam penelitian ini merupakan pengembangan dari model Meloni (2014) dan Buonanno (2008). Hasil estimasi dengan menggunakan metode *Fixed Effect (EGLS)* ditunjukkan pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Hasil Regresi *Total Crime* 26 kabupaten/kota di Jawa Barat

Variabel Bebas	Variabel Terikat: Ln (CRIME)
Konstanta	9,1955*** (0,7650)
Ln (GOV)	-0,1691*** (0,0340)
Ln (EXPC)	-1,9864*** (0,3602)
Indeks Theil	0,1383 (0,1691)
DEN	0,0019 (0,0022)
EDUPAR	-0,0019** (0,8177)
R ²	0,9763

* Signifikan pada 10 %, ** Signifikan pada 5 % dan *** Signifikan pada 1 %.

Nilai dalam kurung adalah *robust standard errors*

Kombinasi dari pengeluaran pemerintah sektor perlindungan sosial dan ketertiban keamanan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap *total crime*. Hasil metode *fixed effect* menunjukkan koefisien sebesar -0,1691 dengan tingkat signifikansi 1%. Artinya, bahwa setiap kenaikan pengeluaran pemerintah sektor perlindungan dan ketertiban keamanan sebesar 1% akan menurunkan tingkat kriminalitas per 100.000 penduduk sebesar 0,1691% *ceteris paribus*. Hasil Estimasi pada Tabel 2 secara umum menunjukkan bahwa kombinasi variabel pengeluaran pemerintah sektor perlindungan sosial dan ketertiban keamanan berpengaruh negatif signifikan terhadap *total crime*. Hasil penelitian ini sejalan

dengan penelitian yang dilakukan oleh Erlich (1973) dan Meloni (2014). Becker (1968) berargumen bahwa meningkatkan keamanan dan transfer terhadap individu yang membutuhkan mampu meningkatkan *opportunity cost* dari tindak kriminal. Menurut McPheter (1974) tingkat anggaran di bidang keamanan akan mempengaruhi intensitas upaya yang dilakukan dalam meningkatkan keamanan seperti rutinitas patrol, investigasi, kecepatan respon, serta peningkatan layanan bagi masyarakat sehingga *cost* dari tindak kriminal akan meningkat. Disamping itu, memberikan transfer bagi individu kurang beruntung akan mengubah alokasi waktu seseorang untuk lebih memilih aktivitas legal dibandingkan aktivitas ilegal dikarenakan aktivitas ilegal mampu memberikan *return* yang lebih baik (Meloni, 2014).

Ukuran pendapatan pada penelitian ini menggunakan pengeluaran per kapita per tahun. Rata-rata pengeluaran perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *total crime*. Hasil metode *fixed effect* menunjukkan koefisien sebesar -1,986 dengan tingkat signifikansi 1%. Artinya, bahwa setiap kenaikan pengeluaran perkapita sebesar 1% akan menurunkan *total crime* sebesar 1,986% *ceteris paribus*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ivaschenko et al (2012), Neumayer (2005), Fanzylber et al (2002), dan Meloni (2000). Pengeluaran per kapita berpengaruh negatif terhadap kriminalitas disebabkan karena meningkatnya pendapatan akan meningkatkan *opportunity cost* dari keterlibatan tindak kriminal dan dengan demikian akan mengurangi kecenderungan untuk terlibat dalam tindak kriminal. Namun, pendapatan perkapita dapat berpengaruh positif terhadap kriminalitas karena meningkatnya kekayaan sebagian masyarakat akan meningkatkan pendapatan potensial dari kriminalitas. Selanjutnya, tingkat kesejahteraan masyarakat lain yang mengalami penurunan pendapatan atau pendapatannya tidak berubah akan menurun dalam jangka waktu yang relative karena meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan (Laudrisen, et al, 2013).

Ketimpangan intra wilayah yang diukur melalui indeks Theil menunjukkan hasil positif dengan nilai koefisien sebesar 0,138 namun tidak signifikan terhadap *total crime*. Artinya, ketimpangan wilayah tidak signifikan mempengaruhi *total crime*. Hasil penelitian ini sejalan dengan Neumayer (2005) dan Meloni (2014). Ketimpangan berpengaruh positif terhadap kriminalitas karena meningkatnya ketimpangan. Artinya, konsentrasi kekayaan ekonomi hanya dirasakan oleh sebagai kecil masyarakat sehingga kondisi tersebut akan meningkatkan target potensial akan tindak kriminal (Neumayer, 2005). Sementara itu, untuk beberapa wilayah di mana ketimpangan berpengaruh negatif disebabkan karena *adverse selection* atau permintaan akan perlindungan dari masyarakat berisiko tinggi sehingga keamanan meningkat dan mampu menekan kriminalitas (Chintrakarn, Herzer & Nunnenkamp, 2012).

Laju kepadatan penduduk dengan menggunakan metode *fixed effect* menunjukkan hasil positif dengan nilai koefisien sebesar 0,002 namun tidak signifikan terhadap *total crime*. Artinya, bahwa kepadatan penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap *total crime*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Buonanno dan Montolio (2009). Menurut teori *rational choice* yang dipopulerkan oleh Becker (1968), tindak kriminal lebih banyak terjadi di daerah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi karena insentif *return* dari hasil

kejahatan lebih besar dan biaya tertangkap lebih kecil. Meskipun demikian, kepadatan penduduk di beberapa daerah lain ternyata berpengaruh negatif terhadap tindak kriminal. Meskipun pemerintah memberikan perlindungan maupun peraturan hukum, masyarakat tetap memiliki kontrol akan terjadinya tindak kriminal sehingga kesuksesan langkah pencegahan yang dilakukan tergantung pada tingkat *moral hazard* masyarakat sebagai respon dari tindak pencegahan (Artasasmita dan Wibowo, 2016). Dengan demikian, masyarakat dengan kontrol sosial yang tinggi lebih berpotensi untuk mencegah angka kriminalitas.

Tabel 4. Robustness Check

Variabel Bebas	Variabel Terikat: Ln (CRIME)	
	GMM DIFF	GMM SYS
Cons	7,749*** (3,022)	-0,338 (5,335)
CRIME (-1)	0,201 (0,185)	0,735*** (0,239)
Ln GOV	-0,381** (0,169)	-0,528*** (0,156)
Ln EXP	-1,915* (1,171)	0,964 (2,044)
THEIL	0,882*** (0,218)	0,949* (0,563)
DENGROWTH	0,006** (0,003)	0,008* (0,005)
EDUPAR	-0,003** (0,002)	-0,005** (0,002)
Sargan Test	0,5114	0,7857
AR(2)	0,9662	0,9459

* Signifikan pada 10 %, ** Signifikan pada 5 % dan *** Signifikan pada 1 %.

Nilai dalam kurung adalah *robust standard errors*

Pendidikan dalam penelitian ini menggunakan ukuran tingkat partisipasi pendidikan sekolah menengah atas hingga universitas. Metode *fixed effect* menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sekolah tinggi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *total crime*. Partisipasi pendidikan memiliki nilai koefisien sebesar -0,002 dan tingkat signifikansi 1%. Artinya, bahwa setiap kenaikan tingkat partisipasi pendidikan sebesar 1% akan meningkatkan *total crime* sebesar 0,002% *ceteris paribus*. Menurut teori ekonomi kejahatan dari Becker (dalam Hjalmarsson, 2008) pendidikan berpengaruh negatif terhadap kriminalitas karena pendidikan meningkatkan upah sehingga akan meningkatkan *opportunity cost* untuk *commit crime*. Selain itu, melalui pendidikan, individu belajar untuk lebih bersabar karena dengan bekal pendidikan yang telah ditempuh, individu memiliki potensi untuk mendapatkan penghasilan di masa depan. Sementara itu, menurut Buonanno dan Leonida (2005) pendidikan berpengaruh positif terhadap tindak kriminalitas yang tidak membutuhkan keahlian (*unskilled crime*). Ketika capaian pendidikan rendah, meningkatkan pencapaian pendidikan akan mengurangi angka kriminalitas. Namun, ketika pencapaian

pendidikan relatif tinggi maka tindak kriminal untuk beberapa jenis kriminal (*fraud, white collar crime*) akan meningkat.

Selain menggunakan metode *fixed effect Pooled EGLS (Cross Section Weights)* sebagai analisis utamanya, penelitian ini diperkuat dengan uji konsistensi (*robustness Check*) pada variabel kunci menggunakan model *GMM First Difference (FD-GMM)* dan *System*. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.

Variabel instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggabungkan instrumen yang diadopsi dari penelitian Zhang (1997) dan Buonanno (2009) yaitu persentase penduduk usia lanjut dan transfer pemerintah pusat ke daerah. Tabel 4 menunjukkan bahwa variabel kunci dalam penelitian ini yaitu kombinasi pengeluaran pemerintah di sektor perlindungan sosial dan keamanan (*LnGOV*) bersifat *robust* (konsisten). Selain itu, hasil uji Sargan dan Arellano Bond (AR) menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam variabel ini valid dan terbebas dari autokorelasi karena probabilitas masing-masing $> 0,05$.

Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa peningkatan kebijakan anggaran melalui realisasi pengeluaran pemerintah di sektor perlindungan sosial dan ketertiban keamanan memiliki pengaruh dalam menekan angka kriminalitas. Hasil analisis ini membuktikan adanya ketercapaian tujuan dan sasaran *common goals* berbasis seperti tercantum dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat serta Nawacita yang dicanangkan pemerintah guna menanggulangi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masalah keamanan. Beberapa kebijakan strategis yang dapat dilakukan pemerintah untuk menekan angka kriminalitas di antaranya bagi pemerintah pusat, dan daerah.

Bagi Pemerintah pusat, pertama pemerintah perlu meningkatkan anggaran ketertiban dan keamanan yang ditujukan untuk meningkatkan efek jera yaitu dengan cara meningkatkan probabilitas dari keputusan peradilan (*probability of conviction*), beratnya hukuman (*punishment*), dan rehabilitasi setelah masa penghukuman berakhir. Di samping itu, untuk meningkatkan profesionalisme Polri, dapat dilakukan dengan menerapkan pola rekrutmen yang transparan dan melibatkan lembaga profesi non-Polri sehingga terhindar dari intervensi, budaya sponsor, maupun titipan dan KKN. Selain itu, perlu diadakannya *reward* dan *punishment system* secara konsisten dan konsekuen untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas Polri karena rendahnya penerapan sanksi dan kurangnya apresiasi menimbulkan penyimpangan Polri. Langkah strategis ini perlu dilakukan karena Polri merupakan salah satu unsur utama yang mengemban tugas untuk memberikan perlindungan ketertiban keamanan dan sebagai penegak hukum.

Kedua, pemerintah perlu meningkatkan anggaran perlindungan sosial yang bertujuan untuk memperluas cakupan penerima bantuan, meningkatkan akurasi penargetan, dan meningkatkan benefit dari bantuan sosial agar tercipta kemandirian masyarakat sehingga tidak hanya bergantung pada transfer. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan integrasi dan koordinasi antar program dan antar lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari anggaran yang dikeluarkan. Di samping itu, bantuan sosial yang diberikan harus dilengkapi dengan

pemberdayaan masyarakat agar kewirausahaan meningkat dan peran Badan Usaha Milik Desa maksimal.

Ketiga, pemerintah perlu meningkatkan perluasan layanan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja serta dapat menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perluasan ini perlu diutamakan bagi kelompok masyarakat kurang beruntung, tinggal di daerah terpencil, kepulauan, daerah konflik, dan daerah pendidikan yang kinerjanya di bawah rata-rata nasional khususnya daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga akan meningkatkan upah dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan akan menurunkan faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya kejahatan (*criminogenic*).

Sementara itu, bagi pemerintah daerah (1) perlu bekerja sama dengan kepolisian dan masyarakat untuk secara konsisten menerapkan *democratic policing* sebagai pengembangan dari *community policing* (pemolisian masyarakat). *Democracy policing* merupakan gaya pemolisian yang menekankan pada peran di mana aparat kepolisian tidak hanya sekedar menunggu laporan, reaktif terhadap laporan masyarakat, melainkan proaktif atau bersedia hadir di tengah-tengah masyarakat dan mampu menciptakan inovasi-inovasi baru dalam menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat sehingga keadaan ini menuntut penempatan personel yang memiliki kemampuan dasar dalam memahami kondisi geografis, sosiobudaya, dan perubahan-perubahan di suatu daerah. (2) perlu menggali sumber-sumber pendapatan di daerah tertinggal untuk mengurangi kesenjangan yang merupakan salah satu faktor *crimogenic*. Selain itu, pemerintah juga perlu mengoptimalkan pajak penghasilan pribadi bagi kalangan yang memiliki modal dan kewajiban lebih besar dibanding para pekerja. Selanjutnya, redistribusi penerimaan pajak tersebut perlu dilakukan secara merata terhadap hal-hal yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat agar kesejahteraan masyarakat merata sehingga faktor pendorong tindak kriminalitas mampu ditekan.

SIMPULAN

Ada beberapa temuan dari studi ini yang dapat disimpulkan. Pertama, peningkatan kombinasi sektor perlindungan sosial dan ketertiban keamanan memberikan kontribusi dalam menurunkan jumlah total kriminalitas. Perlindungan dari sisi kesejahteraan dalam bentuk bantuan sosial terutama bagi keluarga yang rentan akan guncangan ekonomi akan meningkatkan kontrol sosial masyarakat sehingga angka kriminalitas akan menurun. Selain itu, kombinasi kebijakan perlindungan sosial dan kebijakan ketertiban keamanan (peningkatan probabilitas hukuman, penangkapan dan penyelesaian kasus) mampu meningkatkan *opportunity cost* dalam melakukan tindak kriminal secara bersamaan. Kedua, hasil regresi melalui model *fixed effect* secara umum menunjukkan bahwa variabel kontrol pengeluaran per kapita dan partisipasi penduduk 10 tahun ke atas yang lulus pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan universitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah total kriminalitas. Ketiga, menghadapi gangguan sosial, khususnya

kejahatan, pemerintah dapat mengambil langkah dengan cara meningkatkan anggaran pengeluaran pemerintah khususnya, perlindungan sosial dan ketertiban keamanan dalam rangka meningkatkan perlindungan dari segi keamanan maupun kesejahteraan sosial dengan sasaran khusus yaitu masyarakat yang rentan akan guncangan ekonomi. Selain itu, pemerintah perlu menggali potensi daerah secara intensif dalam rangka mewujudkan pemerataan sektor potensial serta memperluas kemudahan akses pendidikan tinggi bagi keluarga kurang beruntung dan masyarakat di daerah terpencil. Langkah-langkah tersebut dilakukan selain agar pemerintah dapat meningkatkan kondisi keamanan sekaligus pemerintah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat golongan kurang mampu sehingga kesenjangan berkurang dan kontrol sosial masyarakat meningkat yang pada akhirnya mampu menurunkan angka kriminalitas.

Implikasi kebijakan yang dapat dilakukan adalah terdapat beberapa usulan kepada pemerintah selaku pemangku kebijakan agar pemerintah diharapkan secara konsisten berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan melalui bantuan sosial dan memberikan perlindungan keamanan melalui penegakan hukum untuk meningkatkan kondusivitas lingkungan dalam mendukung aktivitas ekonomi. Pemerintah juga diharapkan dapat menciptakan pemerataan pendapatan antar wilayah melalui optimalisasi potensi daerah dan kebijakan perpajakan, serta mempermudah akses pendidikan tinggi bagi daerah tertinggal dan masyarakat yang kurang mampu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arshad, N, Anwar, A, Sarwar, S.(2016). Role of Expenditures and Economic Factors in Determining The Incidence of Crime: Cross Districts Analysis of Punjab. *Caspian Journal of Applied Sciences Research*, 5(2), pp. 32-40. ISSN: 2251-9114
- Atmasasmita, R & Wibowo, K. (2016). *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2014). *Statistik Kriminal 2014*. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2016). *Statistik Kriminal 2016*. Jakarta: BPS
- Becker, G. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169-217. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/1830482>
- Becker, G. (1974). Crime and Punishment: An Economic Approach. *Journal of Political Economy*, 76(2). NBER. ISBN: 0-87014-263-1
- Becsi, Z. (1999). Economic and Crimes in The States. *Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review First Quarter*.
- Buonanno, P & Montolio, D. (2008). Identifying The Socio-Economic and Demographic Determinants of Crime Across Spanish Provinces. *International Review of Law and Economics*, 28(2008), 89–97. DOI : <https://doi.org/10.1016/j.irle.2008.02.005>
- Chintrakarn, P, Herzer, D & Nunnenkamp, P. (2011). FDI and Income Inequality: Evidence From A Panel of U.S. States. *Western Economic Association International*. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1465-7295.2011.00384.x>

- Gillbert, K. & Sookram, S. (2009). *The Socio Economic Determinants Of Violent Crime In Jamaica*. United States. University of Poenix.
- Hjalmarsson, R. (2008). Crime and Expected Punishment: Changes in Perceptions at The Age of Criminal Majority. *American Law and Economics Review*, 11(1), 209-248. DOI: 10.2139/ssrn.1002390
- Laudrisen, J.T, Zeren, F, Ari, A. (2013). A Spatial Panel Data Analysis Of Crime Rates in EU. *Discussion Papers on Business and Economics*. No.2/2013.
- Meloni, O. (2014). Does Poverty Relief Spending Reduce Crime? Evidence From Argentina. *International Review of Law and Economics*, 39(2014), 28-38. DOI : <https://doi.org/10.1016/j.irl.2014.05.002>
- Neumayer, E. (2005). Inequality and Violent Crime: Evidence from Data on Robbery and Violent Theft. *Journal of Peace Research*, 42(1), 101–112. DOI: 10.1177/0022343305049669
- O’Sullivan, A. (2009). *Urban Economics*, Seventh Edition. New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Zhang, J. (1997). The Effect of Welfare Programs on criminal behavior: A theoretical and Empirical Analysis. *Economic inquiry* 35(1), 120–137. DOI : <https://doi.org/10.1111/j.1465-7295.1997.tb01899.x>